

## MANAJEMEN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI CISADANE DARI ASPEK KELEMBAGAAN (Studi Kasus Kota Tangerang)

Moh. Didi Haidir<sup>1\*</sup>, Idi Namara, Nurul Chayati<sup>2</sup>, Fadhila Muhammad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Teknik Sipil, Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Jln. KH. Sholeh Iskandar Km 2,  
Kedung Badak, Tanah Sereal, Bogo, Jawa Barat 16164

\*Email : moh.haidir30@gmail.com

### ABSTRAK

Sungai Cisadane merupakan salah satu sungai yang sangat vital di Provinsi Banten Indonesia. Air sungai ini dimanfaatkan sebagai sumber baku air PDAM, pertanian perikanan, dan perindustrian dalam skala kecil maupun besar. Yang menjadi persoalan pada air sungai ini adalah tingkat pencemaran yang masih tinggi, terutama limbah industri. Meskipun banyak instansi yang telah berperan dalam pengelolaan kualitas air Sungai Cisadane baik di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi Banten, maupun Tingkat Kota Tangerang.

Efektivitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dapat tercapai apabila ada kerjasama yang baik antar lintas sektor lembaga yang menangani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pola koordinasi lembaga terkait pengelolaan kualitas air sungai Cisadane Kota Tangerang. Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2008 pasal 1 ayat 36 tentang pengelolaan sumber daya air dijelaskan bahwa wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Metode penelitian yang dipakai adalah; *Focus Group Discussion*, analisis SWOT dan Analisis Kualitatif. Kajian yang dilakukan meliputi peran dan koordinasi kelembagaan lintas sektoral serta analisis efektivitas dalam keberhasilan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Data yang dipakai yaitu tupoksi dari masing-masing inventarisasi kelembagaan Pemerintah terkait pengelolaan kualitas air sungai Cisadane. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kelembagaan yang menangani kualitas air sungai Cisadane tidak berjalan dengan baik, kelembagaan juga sering kali lemah berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kualitas air sungai Cisadane.

**Kata kunci:** Pengelolaan kualitas air sungai, efektivitas kelembagaan, pola koordinasi, FGD, SWOT

### ABSTRACT

*Cisadane river is a very vital river in Indonesian Banten Province. Water river use as standard energy resource of PDAM water, agriculture, fishery and industry on small scale as well as big scale. Problems occurred in the segment of cisadane river is high pollution from industry waste. Although much instance have a role on quality management of cisadane river water, at center level, Banten province level as well as Tangerang city.*

*Effectiveness management of institution water energy resource will reach when a good cooperation between institute sector. This research as a purpose for actor analyze and coordination pattern related institute planning and management cisadane water energy resource Tangerang City. Government regulation according 2008 no. 42 section 1 verse 36 water energy research management about according that institute coordination water energy research management is place institute all importance owner on water energy research area doing framework of importance integration all sorts of sector, region and importance owners on water energy research area.*

*The research method agreed is Focus Group Discussion, SWOT analysis and Qualitative Analysis. Study do include the actor and institute coordination of sector across effectiveness analysis*

*on succes institute management of water energy research. The data use is assignment, fundamental and fungtion from every inventory of government institute related Cisadane river water quality management. From the analysis, it can be concluded that the institution handling Cisadane river water quality does not go well, are also often weak institutional coordination in resolving the problems encountered in the management of Cisadane river water quality.*

**Keywords** : *Management of river water quality, institutional effectiveness, FGD, SWOT and coordination pattern*

## PENDAHULUAN

Sungai Cisadane merupakan salah satu sungai yang sangat vital di Provinsi Banten Indonesia. Sungai Cisadane yang mengalir dari wilayah Provinsi Jawa Barat sampai Provinsi Banten dan melintasi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang merupakan salah satu sungai yang digunakan sebagai bahan baku air PDAM, pertanian, perikanan, dan perindustrian dalam skala kecil maupun besar. Hal tersebut menuntut pengelolaan kualitas air sungai yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air sungai tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Namun, yang menjadi persoalan pada air sungai ini adalah tingkat pencemaran yang masih tinggi, terutama limbah industri. Meskipun banyak instansi yang telah berperan dalam pengelolaan kualitas air Sungai Cisadane baik di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi Banten, maupun Tingkat Kota Tangerang tetapi tingkat efektivitas dalam implementasi kebijakannya masih dirasa rendah.

Efektivitas kelembagaan pengelolaan kualitas air sungai dapat tercapai apabila ada kerjasama yang baik antar lintas sektor lembaga yang menangani. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ada komunikasi dan kepedulian yang efektif antar kelembagaan dalam pengelolaan kualitas air sungai yang terpadu dan berkelanjutan. Peran dan koordinasi antar lembaga pengelolaan kualitas air sungai sangat penting demi terwujudnya pengendalian sumber daya air. Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2008 pasal 1 ayat 36 tentang pengelolaan sumber daya air dijelaskan bahwa wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan

berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan beberapa masalah yang terjadi pada sistem kelembagaan pengelola kualitas air sungai tersebut yaitu seberapa besar tingkat efektivitas dalam implementasi kebijakan kelembagaan terhadap pengelolaan kualitas air sungai Cisadane Kota Tangerang? Dan bagaimana pola koordinasi antar kelembagaan terkait dengan pola pengelolaan kualitas air sungai Cisadane Kota Tangerang?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat efektivitas dalam implementasi kebijakan kelembagaan terhadap pengelolaan kualitas air sungai Cisadane Kota Tangerang dan Mengetahui pola koordinasi antar kelembagaan terkait dengan pola pengelolaan kualitas air sungai Cisadane Kota Tangerang.

Untuk memperkecil ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan beberapa batasan masalah sebagai berikut : a) Kajian kelembagaan Tingkat Kota Tangerang meliputi; Badan Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang. b) Kajian kelembagaan Tingkat Provinsi meliputi; Balai PSDA Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane Provinsi Banten. c) Kajian kelembagaan Tingkat Pusat meliputi; Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan kualitas air sungai yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan kualitas air sungai. Pola pengelolaan kualitas air sungai tersebut disusun berdasarkan wilayah sungai, dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, serta dilakukan dengan melibatkan peran

masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya. Pola pengelolaan kualitas air sungai ini didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air. Dengan demikian pengelolaan kualitas air sungai harus dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir.

Upaya pengelolaan kualitas air sungai ditujukan untuk terwujudnya kondisi yang optimal dari sumber daya alam baik vegetasi, tanah dan air dalam suatu DAS sehingga mampu memberi manfaat secara maksimal dan berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 2 Tahun 2011 Pasal 36 Ayat 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dijelaskan bahwa rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air diarahkan untuk mendukung air baku dengan mengoptimalkan peruntukan sumber air permukaan dan sumber air tanah. Untuk terwujudnya tujuan tersebut maka upaya pengelolaan kualitas air sungai harus melibatkan banyak pihak atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dalam pemanfaatan sumber daya air dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dan patut diperhitungkan dalam upaya pengelolaan DAS. Pihak-pihak terkait terdiri dari unsur pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha/swasta, akademisi dan tentunya masyarakat sendiri. Negara, sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk merencanakan dan memberlakukan kebijakan, perlu menghadirkan diri dalam sosok yang lebih kuat sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada warganya sesuai fungsi-fungsi yang mesti dijalankan. Negara memiliki kelembagaan yang kuat dengan kapasitas birokrasi pemerintahan yang mampu mendukung pelaksanaan fungsinya dalam alur kerja yang transparan, akuntabel dan demokratis. Pengelolaan kualitas air sungai mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat. Untuk mewujudkan keterpaduan tindak tersebut perlu dibangun mekanisme koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para

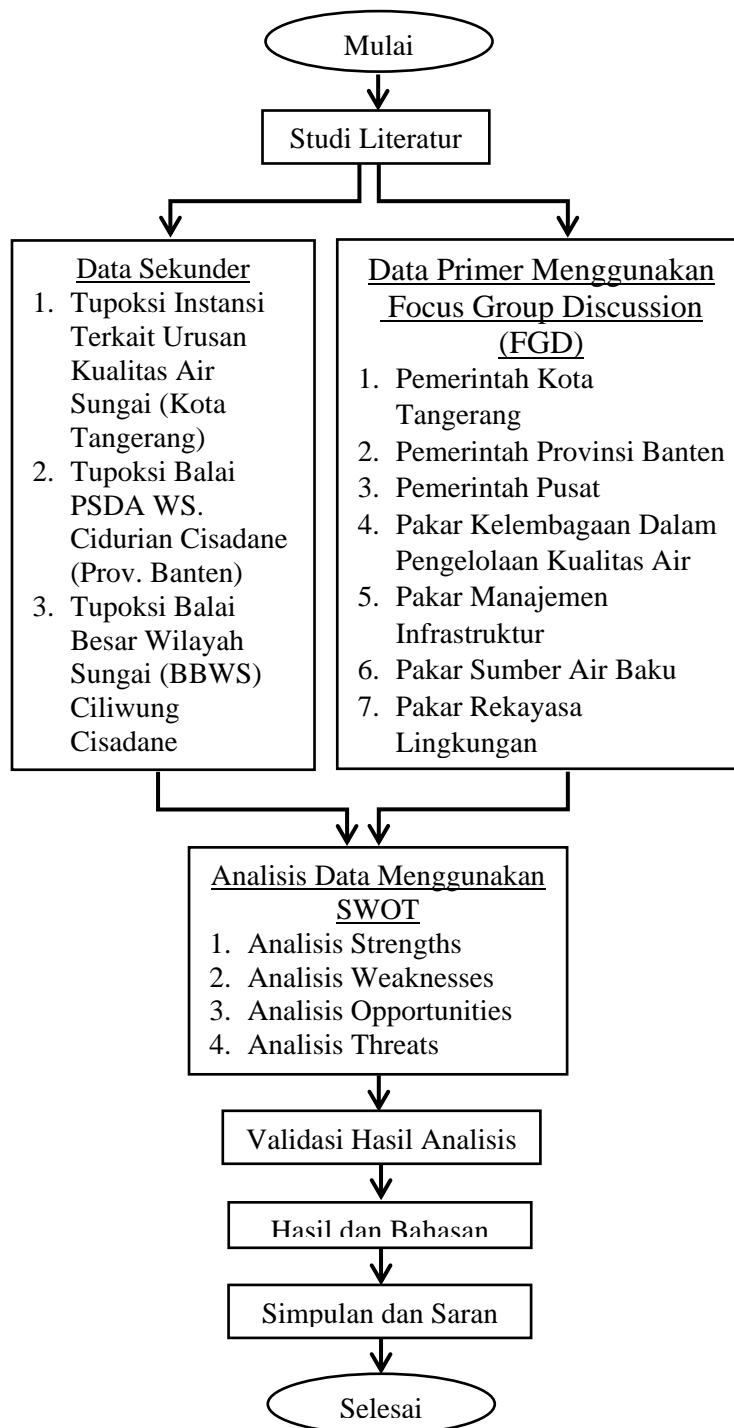
pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Dalam Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 2 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air dijelaskan bahwa Pengelolaan kualitas air pada air dan sumber air dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Interaksi kelembagaan mengacu pada saling ketergantungannya kelembagaan pemerintah dalam pengaturan sehingga efektivitas kelembagaan dipengaruhi oleh koordinasi antara kelembagaan tersebut (Nielsen et al., 2013).

## METODE

Metode penelitian yang dipakai adalah; *Focus Group Discussion*, analisis SWOT dan Analisis Kualitatif. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan tujuan untuk memperoleh masukan maupun informasi mengenai suatu permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik, penyelesaian tentang masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah masukan diperoleh dan dianalisis. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek yang bertujuan untuk membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dianalisis. Kajian yang dilakukan meliputi peran dan koordinasi kelembagaan lintas sektoral serta analisis efektivitas dalam keberhasilan kelembagaan pengelolaan kualitas air sungai Cisadane.

Adapun narasumber pada FGD meliputi, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, dari tingkat Provinsi yaitu Balai PSDA Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane, dan tingkat Pusat yaitu Dinas Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane. Diagram alur penelitian disampaikan pada gambar 2.



Gambar 2. Diagram alur penelitian

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dibawah ini adalah tugas dan tanggung jawab dari lembaga terkait yang menangani

kualitas air sungai Cisadane, hasil Focus Group Discussionn (FGD) dari lembaga terkait, dan analisis SWOT yang telah di kaji.

Tabel 1. Peran dan tanggung jawab lembaga terkait dalam pengelolaan kualitas air sungai Cisadane.

<b>Lembaga atau Instansi</b>	<b>Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Terkait Pengelolaan Kualitas Air Sungai Cisadane</b>
Badan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian lingkungan hidup;</li> <li>• Pengoordinasian bidang pengendalian lingkungan hidup;</li> <li>• Pembinaan dan penyusunan perencanaan pengendalian lingkungan hidup;</li> <li>• Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup yang meliputi perencanaan lingkungan hidup, pemantauan dan evaluasi, konservasi lingkungan hidup, pendataan dan informasi, serta penyuluhan lingkungan hidup;</li> </ul>
Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Air berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi, sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;</li> <li>• Melakukan penyusunan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;</li> <li>• Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;</li> <li>• Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;</li> <li>• Melakukan analisis dan evaluasi atas hasil masing-masing jenis pekerjaan pembangunan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;</li> <li>• Melakukan pengadaan dan perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir; dan</li> <li>• Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;</li> </ul>
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan kebijakan teknis urusan kebersihan dan pertamanan;</li> <li>• Pelaksanaan tugas teknis pembangunan, pemeliharaan pertamanan;</li> <li>• Pelaksanaan tugas teknis pengendalian, pemeliharaan kebersihan;</li> <li>• Pelaksanaan pengangkutan, penataan TPA, pengolahan dan pemberdayaan sampah;</li> </ul>
Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peruntukannya;</li> <li>• Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan air bersih/air minum, air limbah domestik (sanitasi), drainase, jalan lingkungan;</li> <li>• Penyelenggaraan pembagunan prasarana dan sarana air minum sanitasi, drainase lingkungan, jalan lingkungan;</li> <li>• Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan air bersih;</li> <li>• Penetapan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan serta pengelolaan kebersihan;</li> <li>• Penyelenggara pengelolaan persampahan/kebersihan mulai dari tahap penampungan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan, pembuangan akhir sampah;</li> </ul>
Balai PSDA Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air dan permukiman sesuai rencana strategis dinas;</li> <li>• Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang Sungai;</li> <li>• Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang Irigasi;</li> <li>• Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang Perumahan dan Pemukiman;</li> <li>•</li> </ul>

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai Ciliwung Cisadane;</li> <li>• Penyusunan rencana dan pelaksana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai Ciliwung Cisadane;</li> <li>• Pengelolaan SDA pada wilayah sungai Ciliwung Cisadane;</li> <li>• Penyusunan rekomendasi teknis dalam rangka pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan SDA pada wilayah sungai Ciliwung Cisadane;</li> <li>• Operasi dan pemeliharaan SDA pada wilayah sungai Ciliwung Cisadane;</li> <li>• Pengelolaan sistem hidrologi pada wilayah sungai Ciliwung Cisadane;</li> <li>• Penyelenggaraan data dan informasi SDA wilayah sungai Ciliwung Cisadane;</li> <li>• Fasilitas kegiatan koordinasi pengelolaan SDA wilayah sungai Ciliwung Cisadane;</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA pada wilayah sungai Ciliwung Cisadane;</li> <li>• Pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.</li> </ul>
---	--

Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan tujuan untuk memperoleh masukan maupun informasi mengenai suatu permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik, penyelesaian tentang masalah ini ditentukan

oleh pihak lain setelah masukan diperoleh dan dianalisis. Berikut ini adalah rangkuman penting FGD yang mengundang beberapa pihak atau instansi terkait dalam pengelolaan kualitas air sungai Cisadane Kota Tangerang, baik dari tingkat Kota Tangerang, tingkat Provinsi, maupun dari tingkat Pusat.

Tabel 2. Resume Focus Group Discussion (FGD) Lembaga terkait pengelolaan kualitas air sungai Cisadane.

Lembaga atau Instansi	Hasil Focus Group Discussion (FGD)
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 2 tugas pada Perubahan PP No. 82 Tahun 2001 meliputi tentang pengelolaan kualitas air yaitu mempertahankan beberapa daerah-daerah yang dipertahankan dan pengendalian pencemaran air yaitu dalam kondisi alamiah arahnya ke pengendalian.</li> <li>• PP No. 82 Tahun 2001 masih belum dapat di implementasikan dengan baik.</li> <li>• PP No. 82 Tahun 2001 tugas atau kewenangannya meliputi: a) implementasi dan identifikasi sumber pencemaran, b) daya tampung beban pencemaran, c) menentukan baku mutu air limbah maupun sungai, d) perizinan, pemantauan, dan pengawasan.</li> <li>• Tugas dan kewenangan pada PP No. 82 Tahun 2001 belum terlaksana sepenuhnya, hanya tentang perizinan, pemantauan dan pengawasan yang sudah terealisasi.</li> <li>• PP No. 82 Tahun 2001 lebih fokus ke sungai, padahal yang dibahas yaitu tentang sumber daya air yang mencakup air tanah, situ, dan danau. Dan kedepannya akan mengevaluasi tentang muara.</li> <li>• Kualitas air pada sungai Cisadane bukannya membaik malah semakin buruk.</li> <li>• Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas air diantaranya limbah domestik dan sampah.</li> <li>• Aliran DAS Cisadane termasuk 15 DAS di Indonesia yang prioritasnya diutamakan.</li> <li>• Pendekatan kewenangan harus dievaluasi antara Dinas Kehutanan dan pendekatannya berdasarkan daerah aliran sungai, Dinas Pekerjaan Umum pendekatannya berdasarkan wilayah sungai, dan kewenangan pusat berdasarkan aliran sungai dari hulu sampai hilir.</li> <li>• Peraturan baru tentang limbah domestik dan sampah yaitu pada PP No. 68 Tahun 2016.</li> </ul>
Tata Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalah komitmen tidak sebatas dari Pemerintah Daerah tetapi juga Pemerintah Pusat, karena sungai Cisadane termasuk sungai Nasional.</li> <li>• Banyak PDAM yang menjadikan sungai Cisadane sebagai sumber bahan bakunya.</li> <li>• Sungai Cisadane tidak pernah di evaluasi, kegiatan disekitarnya yang seharusnya dilakukan tetapi masih belum terlaksana.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian pencemaran harus berada dari sumber atau dari hulunya.</li> <li>• Pengendalian DAS Cisadane terbatas oleh wilayah yang di lalunya.</li> <li>• IPAL berada dibawah pengendalian Dinas Cipta Karya.</li> <li>• Pemukiman di area sungai berada dibawah pengendalian Dinas Tata Ruang.</li> <li>• Industri yang membuang limbah secara langsung ke aliran sungai ada dibawah pengendalian Badan Lingkungan Hidup.</li> </ul>
Pakar Rekayasa Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No. 82 Tahun 2011 menurut kacamata ilmiah dibuat dengan idealisasi dan implementasi yang tidak akan mungkin terealisasi.</li> <li>• PP No. 82 Tahun 2001 tidak akan mungkin menjadi jembatan untuk terpenuhinya kebutuhan kualitas air minum apabila persyaratan teknis air minum di kelas satuan yang memang tidak pernah ada.</li> <li>• Sungai Cisadane secara menyeluruh yang lebih cepat tata guna lahannya yaitu di Kota Tangerang.</li> <li>• Persoalan mendasar dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik anggarannya apakah sudah menjadi satu kesatuan, karena 82% limbah terbesar adalah dari domestik.</li> <li>• Harus ada koordinasi Stakeholders kelembagaan terkait yang menangani DAS Cisadane.</li> <li>• Pendanaan untuk sarana dan prasarana sungai Cisadane masih tumpang tindih.</li> </ul>
Balai PSDA Cidurian-Cisadane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada UU No. 7 Tahun 2004 kewenangannya ada di Tingkat Pusat yaitu BBWS Ciliwung Cisadane, Balai PSDA Cidurian-Cisadane hanya menjadi sebatas koordinasi.</li> <li>• Tugas Balai PSDA Cidurian-Cisadane hanya dalam operasional dan pemeliharaan, perizinan pengelolaan air sungai, pemanfaatan bantaran sungai, dan pemantauan kualitas air sungai Cisadane.</li> <li>• Operasi pengaturan air hanya untuk jaringan irigasi saja.</li> <li>• Pemeliharaan saluran air hanya bersifat agar saluran berfungsi dengan baik.</li> <li>• Rehabilitasi dan izin pemanfaatan sungai ada di bawah pengendalian BBWS Ciliwung Cisadane.</li> <li>• Kualitas air sungai Cisadane berada dikels 2 dan masih layak dimanfaatkan.</li> <li>• Kuantitas air pada musim kemarau masih kurang.</li> </ul>
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titik pantau kualitas air sungai Cisadane ada di pos Genteng, Batu Belah, Babakan, dan Serpong</li> <li>• Pengeluaran izin sipa perusahaan yang menggunakan sumber air sungai Cisadane ada di kementerian dan harus dilengkapi rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh BBWS Ciliwung Cisadane.</li> <li>• BBWS Ciliwung Cisadane tidak mengeluarkan izin sipa untuk daerah irigasi.</li> <li>• Koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan masih belum efektif.</li> </ul>
Pakar Hukum Dan Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk menganalisa peranan pemerintah dan kelembagaan pengelola yang terkait dengan pelaksanaan teknis suatu kewenangan maka perlu dipahami struktur dasar ketatanegaraan, terutama apabila bidang dan institusi pengelolaannya sudah berdiri sebelum tahun 2002.</li> <li>• Mengapa tahun 2002 menjadi tolok ukur? Perlu dipahami bahwa jika dilihat dari struktur ketatanegaraan maka banyak perubahan mendasar yang terjadi sejak tahun 2002.</li> <li>• Untuk itu supaya latar belakang komprehensif perlu digambarkan struktur ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sebelum dan Pasca 2002.</li> <li>• Hal ini perlu dijelaskan pula untuk memahaminya dengan memaparkan Teori Jenjang Peraturan Perundang-undangan atau Stufenbau Theorie dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.</li> <li>• Identifikasi dilakukan dalam bentuk matriks, sehingga dapat terlihat nanti gambarannya apakah antar peraturan, antar kewenangan lembaga ada yang beririsan atau justru ada yang luput tidak diatur atau ditangani oleh peraturan atau instansi manapun.</li> <li>• Setelah semua hal tersebut jelas, maka pendekatan lain yang harus dilihat adalah anggaran di masing-masing lembaga. Apakah cukup dan atau sudah efektif pelaksanaannya.</li> </ul>

- Persoalan yang umum terlihat adalah, lembaga tidak punya cukup kewenangan, atau lembaga punya kewenangan tumpang tindih. Selanjutnya lembaga tidak punya cukup anggaran untuk dilaksanakan.
- Penyelesaian masalah yang kerap dilakukan adalah dengan membentuk lembaga koordinasi yang terkadang tidak menyelesaikan masalah. Lembaga koordinasi tidak akan menyelesaikan masalah jika analisa akar permasalahan dari ketidakkonsistenan dalam pembuatan aturan karena tidak memahami perubahan UUD tidak disadari dan menjadi bagian yang harus dipecahkan diluar masalah kebutuhan kelembagaan itu sendiri. Lembaga koordinasi juga sering lemah dalam penyelesaian karena kewenangannya hanya bersifat koordinatif, dan tidak mempunyai anggaran yang cukup.
- Dalam analisa kasus pengelolaan kualitas air Cisadane akan tampak kompleks karena harus dilihat dari: a) Ruang lingkup wilayah yang harus dikelola tidak cukup hanya pada bagian air sungai yang melintasi kota tapi jauh dari hulunya harus sudah harus dikelola. b) Instansi yang terlibat kemungkinan tidak hanya meliputi daerah, tapi juga pusat. Daerah pun tidak hanya berada di satu provinsi. c) Bidang yang terkait bukan hanya dari sisi pengelolaan SDA, pekerjaan umum, lingkungan, dan lain lain. d) Perlu pertimbangan resistensi jika akan dilakukan perombakan kewenangan terkait suatu lembaga. Sekedar menampung dan menggabungkan dalam lembaga baru belum tentu menyelesaikan persoalan.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek yang bertujuan untuk membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dianalisis. Tabel 3 dibawah ini adalah ringkasan dari hasil analisis SWOT yang berkaitan dengan Instansi atau Lembaga dalam pengelolaan kualitas air sungai Cisadane.

Tabel 3a. Analisis kekuatan (*strengths*)

Pokok Permasalahan	Nilai
Instansi pemerintah yang mengawasi pengelolaan kualitas air sungai Cisadane	3,07
Anggaran biaya pemerintah untuk sarana dan prasaran sungai Cisadane sudah di anggarkan.	3,20
Sungai Cisadane termasuk sungai Nasional yang banyak dimanfaatkan oleh industri sekitar.	3,27
Koordinasi antar lembaga pemerintah pada pengelolaan kualitas air sungai Cisadane.	2,73
Pendapatan dana dari industri yang memanfaatkan air sungai Cisadane.	3,20
Pendapatan dana dari ganti rugi industri yang membuang limbah ke sungai Cisadane.	3,33
Aturan hukum yang menangani kualitas air sungai Cisadane.	2,80
Kualitas air sungai Cisadane berada dikels 2 dan masih layak dimanfaatkan.	2,80
Titik pantau kualitas air sungai di beberapa pos yang bisa di akses secara	2,53

online.

Total nilai = 2,99

Tabel 3b. Analisis kelemahan (*weaknesses*)

Pokok Permasalahan	Nilai
Kualitas air pada sungai Cisadane bukannya membaik malah semakin buruk.	3,07
Sungai Cisadane tidak pernah di evaluasi, kegiatan disekitarnya yang seharusnya dilakukan tetapi masih belum terlaksana.	2,87
Kuantitas air pada musim kemarau masih kurang.	3,27
Membutuhkan anggaran biaya yang sangat besar untuk sarana dan prasaran sungai Cisadane.	3,07
Terlalu banyak instansi pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan air sungai Cisadane.	3,00
Koordinasi antar instansi pemerintah masih lemah.	2,93
Aturan hukum yang menangani air sungai Cisadane masih belum maksimal.	3,20
Sempitnya lahan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah.	3,27
Pembagian wilayah administratif terkena dampaknya dari penerapan kebijakan pemerintah.	3,27
Pendapatan dana dari industri yang memanfaatkan ataupun ganti rugi industri yang membuang limbah ke sungai Cisadane masih belum maksimal.	3,40

Total nilai = 3,13



Tabel 3c. Analisis peluang (*opportunities*)

Pokok Permasalahan	Nilai
Perlu adanya lembaga koordinasi untuk menentukan suatu kebijakan yang telah disepakati bersama.	2,73
Perlu adanya Pihak-pihak dari non pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kualitas air sungai Cisadane baik dari dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat sendiri.	2,67
Banyak kesempatan untuk membangun kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan kualitas air sungai Cisadane.	3,13

Total nilai = 3,33

Tabel 3d. Analisis ancaman (*threats*)

Pokok Permasalahan	Nilai
Kelembagaan saat ini belum maksimal dalam mengelola sungai Cisadane yang dapat digunakan oleh media massa untuk di publikasikan.	3,20
Koordinasi antar lembaga yang menangani baik dari tingkat Kota, tingkat Provinsi, maupun tingkat Pusat belum optimal.	2,67
Pertumbuhan populasi di kota Tangerang sangat tinggi baik dari SDM ataupun industri.	3,40

Total nilai = 3,09

Dari perhitungan nilai faktor internal adalah (S - W) = -0,33 (minus) dan dari faktor eksternal adalah (O - T) = -0,24 (minus). Berdasarkan analisis SWOT tugas dan tanggung jawab kelembagaan terkait pengelolaan kualitas air sungai Cisadane masih buruk. Kelembagaan saat ini dalam melaksanakan tugasnya masih cukup baik, tetapi dalam koordinasi antar lembaga masih kurang efektif dan tumpang tindih. Mereka masih mengedepankan tanggung jawab dan saling melengkapi diantara lembaga.

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kelembagaan yang menangani kualitas air sungai Cisadane tidak berjalan dengan baik, kelembagaan juga sering kali lemah berkoordinasi dalam menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kualitas air sungai, tumpang tindihnya peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian menimbulkan kebingungan pada masing-masing instansi mengenai wewenang untuk memberikan izin, tidak adanya prosedur perizinan yang diberlakukan dalam pemanfaatan air sungai Cisadane, dan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan dan aturan dalam pemanfaatan air sungai Cisadane.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran dari penelitian ini adalah keberadaan BBWS Ciliwung Cisadane dalam mengelola kualitas air sungai Cisadane harus lebih ditingkatkan lagi, sumber daya manusia untuk pengelola kualitasnya harus dimaksimalkan sehingga perlu adanya perbaikan kualitas SDM, pelaksanaan pengelolaan kualitas air sungai Cisadane lebih baik satu sungai satu lembaga yang menangani agar lebih efektif dalam pengelolaannya.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Idi Namara, S.T., M.T, Ibu Nurul Chayati, M.T, dan Fadhila Muhammad LT. S.T. sebagai pembimbing penelitian yang telah membimbing untuk menyelesaikan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Nielsen, H. O., Frederiksen, P., Saarikoski, H., Rytkonen, A., & Pedersen, A. B. (2013). *How different institutional arrangements promote integrated river basin management. Evidence from The Baltic Sea Region*. Land Use Policy, 30(1), 437–445. Doi: 10.1016/j.landusepol.2012.04.011.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 2 Tahun 2013 *Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air*.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 2 Tahun 2011 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*.